

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Anak merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan makhluk sosial. Sejak dalam kandungan anak mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orangtua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Oleh karena itu anak harus dijaga dan diperlakukan dengan baik supaya masa depannya gemilang dan mampu meraih cita-citanya. Karena anak ialah generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraannya.

Kenyataannya yang terjadi saat ini sering tidak sesuai, anak sebagai pihak yang lemah sering dimanfaatkan oleh beberapa pihak demi mendapatkan keuntungan yang kemudian sampai melanggar hak yang harus dia terima sebagai manusia. Kejahatan – kejahatan pada anak pada saat ini memang marak terjadi dimana-mana. Kejahatan – kejahatannya berupa penyiksaan , penelantaran , hingga anak menjadi korban pelecehan seksual, dll. Kasus – kasus kekerasan seksual tidak hanya terjadi di Kota – Kota besar saja melainkan sudah mulai merambah pada Daerah – Daerah kecil. Seperti halnya yang terjadi pada Daerah

Kabupaten Banyuwangi dimana kasus – kasus pelecehan seksual kebanyakan selalu menjadikan korbannya adalah

anak di bawah umur, kasus pelecehan seksual di Kabupaten Banyuwangi pun terus mengalami peningkatan hal tersebut dapat kita lihat di berbagai surat kabar, dan media elektronik. Kasus pelecehan seksual yang paling banyak terjadi di Kabupaten Banyuwangi yaitu adalah kasus pemerkosaan anak di bawah umur. Sedangkan Daerah Kabupaten Banyuwangi sendiri merupakan Daerah di ujung pulau jawa dimana penduduknya pun tidak terlalu padat, bahkan Daerah tersebut masih sangat kental akan budaya dan agamanya. Namun ternyata hal tersebut menjadikan Daerah Kabupaten Banyuwangi termasuk daerah yang rawan akan kejahatan pada anak.

Berdasarkan data Kepolisian Resort Banyuwangi jumlah kasus kekerasan terhadap anak bergerak fluktuatif. Pada 2013, terdapat 120 kasus, lalu turun menjadi 64 kasus pada 2014, namun pada 2015 meningkat menjadi 102 kasus. Sebanyak 67 persen dari kasus tersebut adalah kekerasan seksual. Adapun yang lainnya adalah kekerasan fisik dan sengketa hak asuh. Adapun hingga Maret 2016, terjadi 27 kasus kekerasan terhadap anak di banyuwangi.<sup>1</sup>

Berikut ini merupakan beberapa kasus pelecehan seksual pada anak yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.

- a) Aparat polsek tegal delimo mendatangi kediaman MZ (19), di Dusun Bayatrejo, Desa Wringinpitu, pada Minggu malam (22/8/2016). Kehadiran petugas sekitar pukul 23.00 WIB ini untuk mengamankan

---

<sup>1</sup> News Republika. *Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, dalam <http://www.republika.co.id>. diakses 02 Oktober 2016.

pemuda yang memiliki nama saki karena di duga terlibat dalam kasus kekerasan seksual terhadap gadis dibawah umur.

Proses penangkapan jelang dini hari tersebut disaksikan orang tua pelaku. MZ tak berkutik sewaktu aparat membawanya ke Malposek Tegaldelimo meskipun orang tuanya merasa berat. Dia ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik menemukan sejumlah bukti. Nama MZ masuk dalam daftar tahanan aparat lantaran menggauli HS (14), siswi sekolah setingkat SMP yang tinggal di desa Desa Wringin Putih, Kecamatan Muncar. Penelusuran polisi mengungkap tentang peran minuman keras jenis tuak yang menjadi pemicu terjadinya seksual ini. Derita HS bermula sabtu (20/08/1016) sore ketika mendatangi kediaman pelaku sekitar pukul 14.00 WIB. Saat itu korban datang diantar rekan perempuannya berinisial PT. Selang 6,5 jam HS diajak malam mingguan didesa Blambangan, kecamatan Muncar. Di areal persawahan korban menenggak tuak yang dibawa rekan lekaknya. Miras itu membuat HS mabuk berat. Selanjutnya tersangka membawa korban pulang menuju kediamannya di Wringinpitu. Keterangan kalposek tegaldlimo AKP Heri Purnomo, minggu dini hari korban tidur sekamar dengan pelaku. Jelang shubuh MZ membangunkan HS untuk berhubungan badan. Semula ditolak tapi pelaku mengancam korban akan memukulinya bila terus berontak. Di tengah ketidakberdayaan itu HS disetubuhi pelaku sebanyak dua kali. Setelah matahari terbit pelaku mengantar korban pulang ke muncar. Kasus kekerasan seksual ini

terkuak setelah YS (35), ibu korban melakukan visum di PKU Muhammadiyah Muncar. Hasilnya sangat mengejutkan sehingga kasus ini dilaporkan ke Polsek Tegaldlimo.<sup>2</sup>

- b) Polsek Pesanggaran Kabupaten Banyuwangi sedang memproses hukum EK (32). Lelaki yang masih melajang diusianya yang tak lagi muda diduga melakukan aksi kekerasan seksual terhadap keponakannya sendiri yang masih SMP.

Pemeriksaan tersebut di duga terjadi tepat pukul 18.00 WIB, saat kawasan Desa Kandungan Kecamatan Pesanggaran memasuki waktu Magrib. Kisah tragis ini terjadi di kamar korban, RS (13), yang tengah lenggang. Saat itu pelaku meruda paksa keponakannya ditengah birahi yang tak bisa dikendalikan lagi. secara liar EK melampiaskan sahwatnya terhadap gadis yang layak untuk di lindungi. Tangan kekarnya langsung membungkam mulut korban, lalu mulai melakukan aksi seksual terlarang. Tak hanya mencabuli tubuh bagian luar RS sang paman itu juga tega menembus gawang keponakan yang bakal menjadi kebanggaan saat menikah nanti. Pelaku EK terbongkar setelah dipergoki oleh SR (33). Kasus ini telah bergulir di Malposek Pesanggaran setelah ibu kandung korban, SD (34) mendengar kisah pilu putrinya yang digagahi pamannya sendiri. Dia pun pilih mengadukan kerabat dekatnya itu ke polisi. Kalposek Pesanggaran AKP Sudarsono membenarkan penanganan kasus pemeriksaan tersebut. Kejahatan

---

<sup>2</sup> Polres Banyuwangi. *Dipaksa Minum Tuak Lalu di Setubuhi Kala Mabuk*. dalam [http:// www .polres banyuwangi .com](http://www.polres.banyuwangi.com). diakses 02 Oktober 2016.

seksual ini terjadi dalam lingkup keluarga yang tinggal dalam satu atap. Tersangka melakukan ulahnya karena terangsang dengan tubuh molek keponakannya. Disamping itu pelaku kerap menonton film porno dalam faktor kedua ini yang kerap melatar belakangi kasus kekerasan seksual.

3

- c) Pria berinisial AD (47 ), ditangkap aparat Satreskrim Polres Banyuwangi atas dugaan pemerkosaan. Kepala juru masak sebuah hotel bintang tiga di Banyuwangi ini dilaporkan telah menyetubuhi paksa EF (16), salah satu siswi SMK yang sedang menjalani praktek kerja lapangan. Kasus ini terkuak atas laporan Leni DR (42), ibu kandung korban. Wanita ini melihat perubahan perilaku putrinya dalam beberapa hari terakhir. Setelah didesak ternyata EF mengaku habis disetubuhi paksa oleh kepala juru masak di hotel tempatnya praktek. Kekerasan seksual yang dialami siswi SMK ini terjadi jumat (3/6/2016) sekitar pukul 16.00 WIB. Sore itu pelaku memintanya masuk dalam ruangan penyimpanan coklat dan buah. Korban menuruti perintah itu karena tersangka bilang ada sesuatu yang mendesak yang hendak di bicarakan. Celaknya, itu hanya akal bulus pria berdarah sunda tersebut untuk meroda paksa “mahkota” korban. Bukannya mengajak dialog, AD justru di dekap dan menciumi remaja yang masih dibawah umur tersebut. sebenarnya korban berontak untuk melepaskan diri sayang tenaganya kalah kuat dengan fisik pelaku. Prilaku tak layak pun dialami

---

<sup>3</sup> Time Indonesia. *Paman tega Perkosa Keponakannya Sendiri*. dalam <http://m.Banyuwangi.timesindonesia.co.id>. diakses 02 Oktober 2016.

korban didalam ruangan itu. Dibawah tekanan dan paksaan EF, kekerasan seksual terjadi tanpa ada yang menolong. Kalpores Banyuwangi AKBP Budi Mulyanto menjelaskan, atas kejahatan ini AD dijerat dengan pasal 760 KUHP junto Pasal 81 ayat 1 UURI nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Kekerasan seksual ini menempatkan AD dalam tahanan aparat.<sup>4</sup>

Sehingga jika penulis melihat banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi tersebut selayaknya Pemerintah Daerah melakukan penanganan khusus terhadap kasus – kasus anak korban pelecehan seksual yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi, guna untuk menurunkan tingkat pelecehan seksual terhadap anak khususnya kasus pemerkosaan terhadap anak di bawah umur. Karena telah jelas dijelaskan Melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan layanan dan fasilitas bagi perempuan dan anak – anak korban kekerasan. Berdasarkan dari peraturan tersebut pemerintah membentuk suatu Lembaga khusus yang menaungi korban – korban khususnya anak sebagai korban tindak pidana yaitu Lembaga Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Lembaga P2TP2A sebagai bentuk nyata atau wujud nyata negara melalui pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam melindungi anak korban tindak pidana khususnya pemerkosaan anak.

---

<sup>4</sup> Berita Lima. *Praktek Masak Siswi SMK Malah di Perkosa Kepala Koki Hotel*. dalam <http://www.berita.lima.com>. diakses 02 Oktober 2016.

Berdasarkan permasalahan diatas maka dalam hal ini penulis menyusun proposal penelitian hukum dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Banyuwangi.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis akan meneliti dan membahas permasalahan yang akan di rumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan anak oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi ?
2. Apa Saja hambatan – hambatan dan upaya yang di alami dan diberikan oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak di Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa saja perlindungan hukum korban tindak pidana pemerkosaan anak oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui Apa Saja hambatan – hambatan dan upaya yang di alami serta diberikan oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam memberikan

perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan anak di Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berikut ini beberapa manfaat penelitian hukum yang ingin di capai oleh penulis, sebagai berikut :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Sebagai sumbangan pemikiran bagi para pembaca agar dapat memberikan suatu manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang membahas tentang Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Banyuwangi.

##### **2. Manfaat Praktis**

Hasil dari penelitian hukum ini penulis berharap dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (L2TP2A) serta dapat bermanfaat untuk pembaca sebagai bahan penelitian lanjutan dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Bagi Penulis**

Penelitian ini diharapkan menambah wawasan bagi penulis mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan



Anak Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan  
Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Banyuwangi

2. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan mampu menjadi sarana bagi masyarakat mengetahui apa sajakah hak-hak korban anak apabila anak menjadi korban dalam suatu tindak pidana. Selain dari pada itu masyarakat dapat mengetahui bagaimana peran negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap korban anak sehingga masyarakat mengetahui bahwa korban anak dalam suatu tindak pidana merupakan tanggung jawab dari negara , pemerintah dan pihak keluarga.

3. Bagi Kalangan Praktisi Hukum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi kalangan praktisi hukum berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Banyuwangi.

4. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, sumbangan pikiran serta kontribusi terhadap pemerintah untuk memperbaiki penegakan hukum di indonesia khususnya dalam kasus pemerkosaan anak terutama bagi lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (L2TP2A) sehingga lebih efektif dalam peranannya dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan

Anak. Sehingga korban – korban kejahatan seksual dapat mendapatkan haknya secara merata khususnya di Kabupaten Banyuwangi.

#### 5. Bagi Kalangan Akademisi

Dalam melakukan penelitian ini penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi untuk penelitian selanjutnya serta dapat menjadi bahan ajar pendidikan pada lembaga-lembaga hukum dan pendidikan di Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan melihat atau melakukan penelitian secara mendalam terkait hubungan antara aspek-aspek hukum dengan penerapan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) di Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam Memberikan Perlindungan hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak serta dalam hal ini penulis juga dapat mendalami bagaimana keefektifan hukum sebagai perilaku di masyarakat.

#### 2. Lokasi Penelitian

Penulis akan mengambil lokasi penelitian di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) di jalan Brigjen Katamso No.2 Banyuwangi. lokasi ini dipilih oleh penulis karena di lokasi tersebut merupakan lokasi yang merupakan lembaga

yang memberikan perlindungan serta hak – hak korban anak dan perempuan sehingga dalam hal tersebut penulis akan mendapatkan data yang akurat.

### 3. Sumber Data

Dalam memalukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa bahan hukum meliputi sebagai berikut :

#### a. Data Primer

Data utama yang diperoleh langsung yaitu dengan wawancara dengan Ketua lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak ( P2TP2A) serta dengan beberapa korban dan aparat kepolisian di polres Kabupaten Banyuwangi, dokumen tertulis yaitu berupa berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian lembaga P2TP2A, dan pendapat yang diperoleh dari sumber informasi/ pertama yaitu Ketua Lembaga P2TP2A, Para Korban, beberapa Aparat Kepolisian dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian atas beberapa kasus pemerkosaan anak yang sedang di teliti berkaitan dengan obyek penelitian.

#### b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan atau keterangan lanjutan mengenai data primer dan data sekunder yang terdiri dari :

##### 1. Berbagai bahan pustaka atau literatur yaitu :

###### a) Buku – buku :

- 1) Abu Huraerah berjudul *Kekerasan Terhadap Anak*
- 2) Bambang Poernomo berjudul *Asas- asas Hukum Pidana*
- 3) Sri Soemarti berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia*
- 4) Setiono berjudul *Rule Of Law*
- 5) Philipus M. Hadjon berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*
- 6) Erdianto Efendi berjudul *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*
- 7) Wagiiati Ekotama berjudul *Hukum Pidana Anak*
- 8) Dll

## 2. Peraturan Perundang – undangan

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
- b. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.’
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2014. Cetakan kelima. Bandung. Citra Umbana.
- d. Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2003 atas perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002
- e. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

f. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

c. Data tersier

Data tersier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, yang dapat memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap data primer maupun data sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Mengadakan wawancara kepada pihak-pihak yang diteliti. Yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada responden yang berhubungan langsung dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis yaitu Ketua Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A), dan aparat Kepolisian.

2. Observasi

Penulis melakukan pengamatan secara langsung dengan mendatangi obyek lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diangkat atau dibahas oleh penulis yaitu di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan Dan Anak ( P2TP2A) di jalan Brigjen Katamso No.2  
Banyuwangi .

### 3. Dokumentasi

Studi dokumentasi yang dilakukan oleh penulis yaitu penulis melakukan penelitian dengan cara mencari dan mengumpulkan bahan – bahan yang di hasilkan oleh lembaga tersebut seperti Data-data jumlah kasus yang di tangani, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan yang di gunakan oleh penulis, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data yang terdapat dalam buku-buku yang membahas terkait dengan : Abu Huraerah berjudul *Kekerasan Terhadap Anak*, Bambang Poernomo berjudul *Asas- asas Hukum Pidana*, Sri Soemarti berjudul *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setiono berjudul *Rule Of Law*, Philipus M. Hadjon berjudul *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Erdianto Efendi berjudul *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Wagiiati Ekotama berjudul *Hukum Pidana Anak* , perundang – undangan yaitu : Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perawinan dan Kompilasi Hukum Islam. 2014, Cetakan kelima. Bandung. Citra Umbana, Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2003 atas perubahan Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. , jurnal , penelitian sebelumnya serta media masa maupun elektronik yang terkait dengan penelitian. Kemudian data- data tersebut akan di sesuaikan dengan kebutuhan jenis data.

#### 5. Internet

Pengumpulan data melalui browsing internet atau website resmi untuk melengkapi data yang di butuhkan oleh penulis yang berkaitan dengan Berita Lima , *praktek masak siswi SMK malah di perkosa kepala koki hotel*, dalam [http:// www berita lima .com](http://www.berita.lima.com), News Republika , *Jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak*, dalam [http: /// www. repu blika.co.id](http://www.republika.co.id), Pemkab Banyuwangi, *Banyuwangi Children Center upaya tekan kekerasan terhadap anak*, dalam <http://www.Banyuwangikab.go.id>, Polres Banyuwangi, *dipaksa minum tuak lalu di setubuhi kala mabuk*, dalam [http:// www.polres banyuwangi .com](http://www.polres.banyuwangi.com), Time Indonesia, *Paman tega perkosa keponakannya sendiri*, dalam [http://m.Banyuwangi .times indonesia .co.id](http://m.Banyuwangi.timesindonesia.co.id). Dll.

## 6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul maka baik data primer, sekunder maupun data tersier dianalisis dengan menggunakan analisis Deskriptif Analitis dengan tujuan disajikan secara deskriptif yang mana menjelaskan, diuraikan dan menggambarkan sesuai dengan tema yang telah diangkat oleh penulis serta akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan pada tahap akhir.

### **G. Sistematika Penulisan**

Guna mencapai sasaran yang telah diinginkan oleh penulis, maka sistematika penulisan ini dibagi dalam empat BAB dan disusun sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam hal ini penulis menguraikan secara umum latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori , metode penelitian, rencana jadwal penelitian, dan sistematika penulisan, sehingga dalam bab I ini tersusun secara terperinci.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab II ini menguraikan secara ilmiah terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Banyuwangi.

### **BAB III PEMBAHASAN**



Berisikan uraian terutama terhadap pembahasan pada rumusan masalah yang kemudian di lakukan analisis data dengan mengandalkan data kongkrit yang telah di peroleh dari hasil penelitian di lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

#### **BAB IV PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran, memuat kesimpulan pembahasan secara singkat serta saran-saran terkait dengan permasalahan yang di teliti oleh penulis

